

BAB I

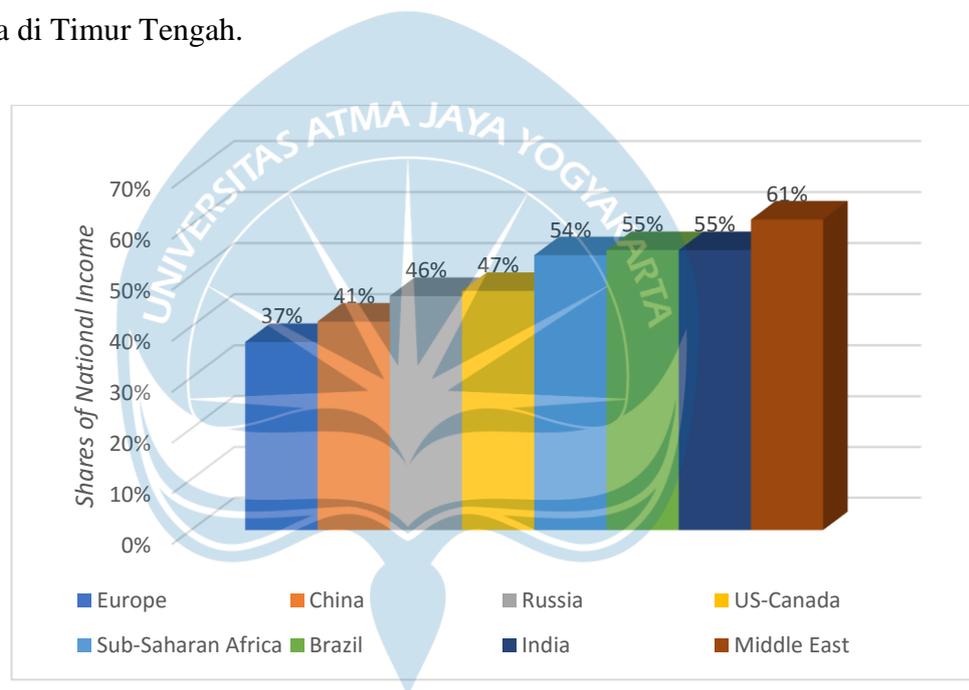
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapat merupakan isu yang masih akan relevan sepanjang masa. Istilah lain untuk menjabarkan ketimpangan pendapatan adalah disparitas yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin. Ketimpangan pendapatan atau kesenjangan dalam distribusi pendapatan masih menjadi masalah yang terus membayangi negara miskin, negara berkembang, hingga negara maju sekalipun. Namun, setiap negara memiliki proporsi permasalahan kesenjangan pendapatan yang berbeda-beda. Menurut Antonio Savoia dalam tulisannya yang dikutip dari *The Conversation*, bahwa perbedaan ketimpangan di tiap negara sulit untuk dilakukan perbandingannya karena data yang tidak tersedia secara akurat ataupun tidak konsisten. Dalam tulisannya, Antonio Savoia menjelaskan temuan dari *World Inequality Report* yang pertama bahwa sejak tahun 1980, distribusi dari total pendapatan negara mayoritas dimiliki oleh 10% orang terkaya dalam negara tersebut (Savoia, 2018).

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di dunia dapat dilihat melalui distribusi pendapatan nasional di seluruh dunia pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, 10% orang kaya di Eropa bahkan mampu menguasai 37% dari total pendapatan nasional. Sementara, China dan Russia yang merupakan negara sosialis ternyata lebih dari 40% total pendapatan nasionalnya dikuasai oleh 10%

orang terkaya di negara tersebut. Ketimpangan distribusi pendapatan Amerika Serikat-Kanada yang merupakan negara kapitalis ternyata tak jauh berbeda dengan China dan Russia. Sebanyak 47% total pendapatan nasional dikuasai oleh 10% orang terkaya di negara tersebut. Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah menjadi wilayah yang paling timpang pada 2016 karena 61% total pendapatan nasional negara tersebut hanya dikuasai oleh 10% orang terkaya di Timur Tengah.



Sumber : WID.world (2018), data diolah peneliti

Gambar 1.1

Top 10% Distribusi Pendapatan Nasional di Seluruh Dunia 2016

World Inequality Report 2018 menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi lebih besar dipengaruhi oleh kepemilikan kapital baik kepemilikan publik ataupun kepemilikan privat (Alvaredo dkk., 2018). Peningkatan kepemilikan kapital (aset) baik secara publik maupun privat tentu saja akan menambah pendapatan nasional.

Namun, jika kepemilikan aset privat oleh sebagian orang kaya yang lebih besar dari pada kepemilikan aset publik maka terdapat indikasi ketimpangan ekonomi dalam negara tersebut. Orang kaya yang memiliki kepemilikan aset privat besar akan memperoleh tambahan pendapatan yang besar dari aset yang dimiliki. Berbeda dengan masyarakat biasa yang cenderung memperoleh pendapatan berdasarkan pekerjaan sehari-hari bukan kekayaan dari aset privat. Perbedaan berdasarkan sumber pendapatan yang terjadi secara terus menerus akan semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Kebebasan kepemilikan aset privat dan aset publik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Isu HAM dan kebebasan kepemilikan juga merupakan salah satu fokus bagi negara-negara demokrasi. Negara demokrasi berdasarkan asas kedaulatan rakyat yang melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi yang dijamin dan dilindungi dalam demokrasi bukan hanya sebatas hak sipil dan politik namun juga hak ekonomi dan sosial budaya dalam suatu negara (Rosana, 2016).

Kolerasi antara demokrasi dan ketimpangan pendapatan yang terjadi tidak dapat dilihat melalui satu aspek kebebasan kepemilikan aset atau kapital saja. Zlatko (2015) menjelaskan bahwa demokrasi lebih banyak terkait dengan distribusi pendapatan yang egaliter serta berhubungan dengan adanya rezim politik dan ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut melakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara demokrasi dan ketimpangan (*inequality*). Zlatko menyebutkan jika beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga menyinggung bagaimana isu kelembagaan dan tipe rezim politik dapat

mempengaruhi tingkatan ketimpangan juga telah diperoleh masyarakat (Zlatko, 2015).

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Meltzer dan Richard (1981) yang mengklaim bahwa demokrasi mampu menurunkan ketimpangan dengan penjelasan demokrasi memberikan ruang bagi pemerintah untuk membuat aturan disinsentif pajak pada masyarakat sebagai pemilih (*voters*). Penelitian tersebut menjelaskan kelembagaan pemerintah atau rezim politik dalam menerapkan aturan merupakan implementasi nyata dari demokrasi. Namun, apakah selamanya demokrasi selalu dapat menurunkan ketimpangan pendapatan? masih banyak pertentangan yang terjadi dalam pembuktiannya.

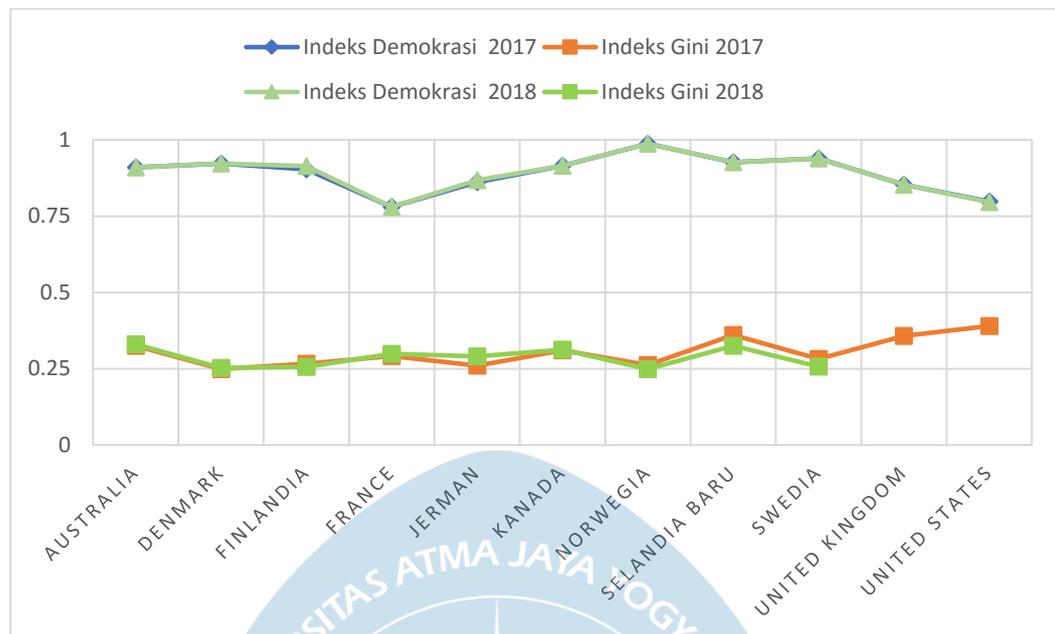
Demokrasi dalam suatu negara dapat diukur dengan indek demokrasi. Indeks Demokrasi EIU (2018) memberikan gambaran tentang keadaan demokrasi dunia yang didasarkan pada lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme; kebebasan sipil; berfungsinya pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik. Berdasarkan skor mereka pada 60 indikator dalam kategori ini, masing-masing negara kemudian dengan sendirinya diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi penuh; demokrasi yang cacat; rezim hibrida; dan rezim otoriter. Sementara ketimpangan pendapatan secara standar internasional dapat diukur menggunakan indek gini (*Gini Ratio*). Indek gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1.

Tabel 1.1 menunjukkan keadaan demokrasi beberapa negara maju di dunia. Menurut laporan *The Economist Intelligent Units*, Norwegia menduduki peringkat 1 negara paling demokrasi di dunia pada tahun 2017 dan 2018 dengan nilai sebesar 0,987. Beberapa negara di Eropa barat memiliki nilai indeks demokrasi yang cukup tinggi di dunia. Indeks Demokrasi di Denmark, Finlandia, dan Swedia tahun 2017 masing-masing sebesar 0,922; 0,903; dan 0,939. Namun, lain halnya dengan Inggris yang termasuk dalam negara maju di Eropa hanya memiliki nilai indeks demokrasi sebesar 0,853 pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan Indeks Demokrasi Amerika Serikat yang merupakan negara *super power* sebesar 0,798 pada tahun 2017 dan turun 0,002 menjadi 0,796 pada tahun 2018.

Tabel 1.1
Indeks Demokrasi dan Indeks Gini Negara Maju Tahun 2017-2018

Negara	2017		2018	
	Indeks Demokrasi	Indeks Gini	Indeks Demokrasi	Indeks Gini
Australia	0,909	0,325	0,909	0,33
Denmark	0,922	0,249	0,922	0,253
Finlandia	0,903	0,266	0,914	0,256
Perancis	0,78	0,292	0,78	0,299
Jerman	0,861	0,26	0,868	0,29
Kanada	0,915	0,31	0,915	0,312
Norwegia	0,987	0,262	0,987	0,249
Selandia Baru	0,926	0,36	0,926	0,325
Swedia	0,939	0,282	0,939	0,257
Inggris	0,853	0,357	0,853	-
Amerika Serikat	0,798	0,39	0,796	-

Sumber : Data.worldbank.org, Knoema.com, www.eiu.com, diolah peneliti



Sumber : Data.worldbank.org, Knoema.com dan www.eiu.com (2018), data diolah peneliti

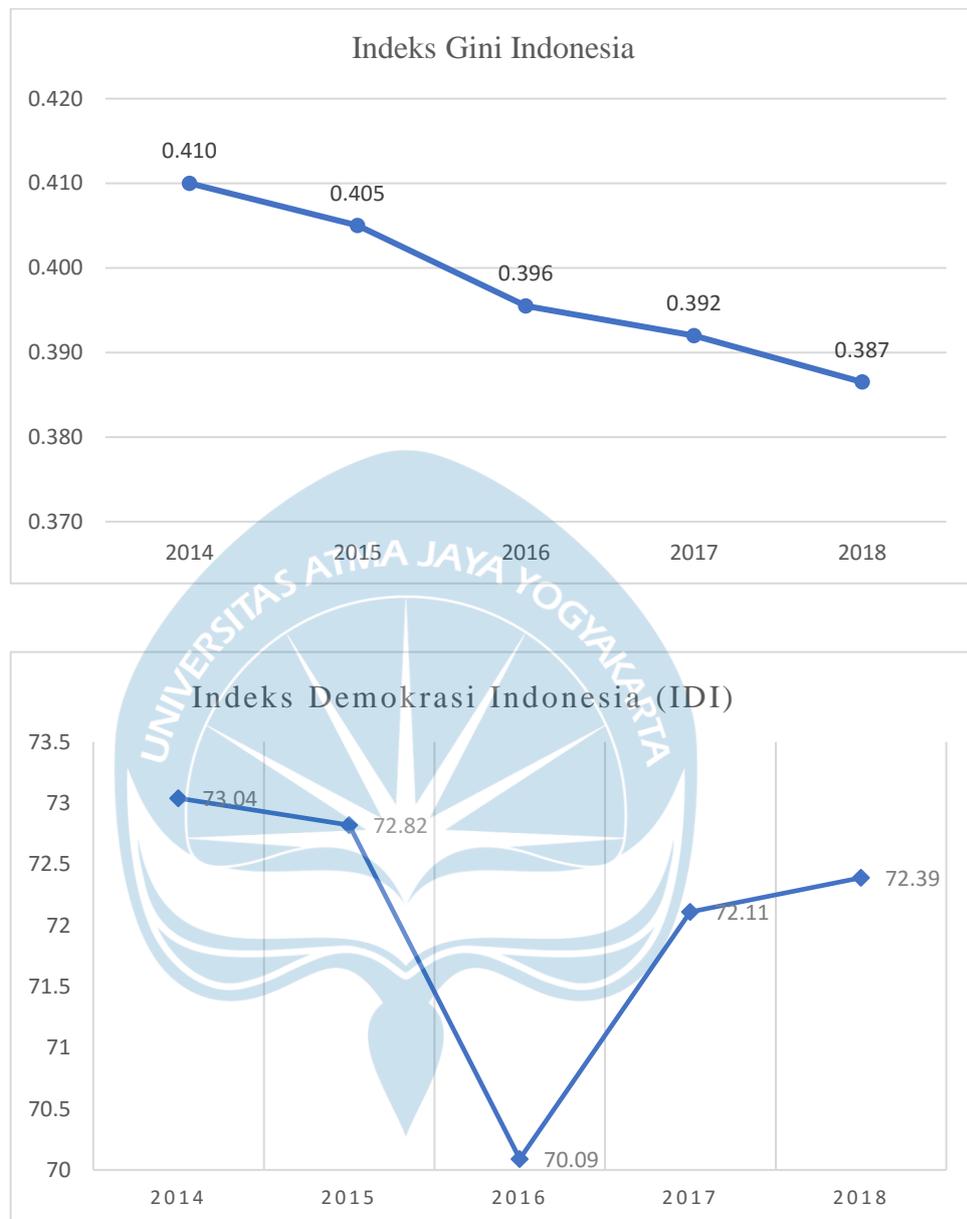
Gambar 1.2
Pola Perubahan Indek Demokrasi dan Indek Gini Negara Maju
Tahun 2017-2018

Tabel 1.1 juga menampilkan informasi Indek Gini untuk mengukur tingkat ketimpangan di beberapa negara di dunia. Norwegia sebagai negara paling demokratis di dunia mencatatkan Indek Gini sebesar 0,262 pada tahun 2017 dan mengalami penurunan ketimpangan pada tahun 2018 menjadi 0,249. Sementara, Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki kekuatan ekonomi besar di dunia justru mencatatkan Indek Gini pada tahun 2017 yakni sebesar 0,39 dan 0,357. Jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, Indek Gini yang menjadi tolak ukur ketimpangan di Amerika Serikat dan Inggris masih cukup tinggi. Meskipun nilai

Indek Demokrasi juga tercatat bagus namun Indek Gini yang tercatat juga cukup tinggi.

Gambar 1.2 memberikan pola yang cukup unik. Dimana, penurunan Indek Gini di Finlandia dari 0,266 pada tahun 2017 menjadi 0,256 di tahun 2018. Hal tersebut berlawanan dengan indek demokrasi di Finlandia yang justru mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 0,914. Perancis juga mencatatkan pola yang berbeda dibandingkan negara lain. Indek demokrasi sebesar 0,78 tercatat pada tahun 2017 dan 2018 yang berarti tidak mengalami perubahan, namun perubahan yang terjadi adalah ketimpangan di Perancis yang mengalami kenaikan dari 0,292 pada tahun 2017 menjadi 0,299 pada tahun 2018.

Data yang ditampilkan lewat Gambar 1.3 juga menunjukkan adanya pola perubahan Indek Demokrasi dan Indek Gini di Indonesia pada tahun 2014 – 2018. Gambar 1.3 menunjukkan trend penurunan indek gini di Indonesia dan perubahan indek Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun 2014 sampai 2018. Jika pada gambar 1.3 Indek Gini mengalami penurunan di setiap tahunnya, lain halnya dengan Indek Demokrasi Indonesia yang menunjukkan perubahan naik turun di setiap tahunnya. Dapat dilihat jika Indek Demokrasi Indonesia pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 70,09. Namun, hal tersebut diikuti juga oleh penurunan Indek Gini Indonesia pada tahun 2016 menjadi 0,396. Berbeda dengan Tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan Indek Demokrasi Indonesia menjadi 72,11 dan penurunan Indeks Gini Indonesia menjadi 0,392.



Sumber : BPS (2018), data diolah peneliti

Gambar 1.3
Perubahan Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Gini Indonesia
Tahun 2014-2018

Pola perubahan yang terjadi pada indeks gini dan indeks demokrasi mungkin bisa saling berkaitan namun belum tentu searah. Untuk membuktikan adanya

keterkaitan satu sama lain maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh demokrasi yang diukur dengan Indeks Demokrasi terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini di 34 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian juga akan menambahkan variabel kontrol lain yakni laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Indeks Demokrasi tiap provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014 – 2020?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan PDRB perkapita tiap provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014 – 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi tiap provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014 – 2020.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh laju pertumbuhan PDRB perkapita tiap provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014 – 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi pemerintah

Penelitian bisa dipertimbangkan sebagai salah satu referensi dalam membuat kebijakan terkait ketimpangan pendapatan. Pemerintah dapat menganalisis bagaimana demokrasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat.

2. Bagi pembaca

Penelitian diharapkan mampu menambah wawasan dan membuka cakrawala pemikiran pembaca (masyarakat) untuk lebih peduli terhadap ketimpangan dan lebih banyak dalam berpartisipasi dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait ke depannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Usulan penelitian ini terbagi ke dalam V bagian, dengan masing – masing berisi

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINAJUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi landasan teori, studi terkait dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menjabarkan data, sumber data, alat analisis, model dan batasan operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang terpadu.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran.